

Abstract

Empirical study of capital expenditure in East Java Government year 2016-2019. Regional autonomy is authority and right of regional government from the central government to doing and managing government and financial as an embodiment of decentralization. To make the decentralization happens, it comes from abilities to give citizens the best and maximum public service. Capital expenditure is an expenditure that used for the beneficial in public service with asset(s) benefit period more than a year. The more the capital expenditure, the merrier the public service.

The purpose of this study was to analyze influence of Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Desentralitation Level, Regional Financial Independence level and Regional Financial Effectiveness Level towards the Capital Expenditures at the regencies/municipalities in the East Java Province from 2016 to 2019. Population sample in this research come from 38 provinces of regional government in East Java Province between 4 years 2016-2019. This research is using sensus method for all population. All datas are analysed by classic assumption and analysis methos that is used in this research is multiple regression analysis with IBM SPSS Statistics software. Partial result of this hypothesis testing concluded that Local Own Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and Regional Financial Effectiveness level has positive influence and significant impact on capital expenditure. While, Special Allocation Fund, Desentralitation Level, and Regional Financial Independence Level hasn't affect the capital expenditures.

Keywords: *Capital Expenditures, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Desentralitation Level, Regional Financial Independence, Regional Financial Effectiveness Level*

Abstrak

Studi empiris belanja modal pemerintah daerah di Jawa Timur tahun anggaran 2016-2019. Otonomi daerah adalah kewenangan dan hak pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan dan mengelola pemerintahan dan keuangan sebagai perwujudan desentralisasi. Terwujudnya desentralisasi berasal dari kemampuan pemda untuk mengelola pemerintahan dan keuangan untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal. Belanja modal adalah belanja yang memberikan manfaat pelayanan publik yang besar dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Semakin besar belanja modal maka semakin besar pula pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan (berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas) terhadap belanja modal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan 4 tahun (2016-2019). Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan asumsi klasik dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara itu, dana perimbangan berupa dana alokasi khusus dan kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas.